



HK 04.01/219

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

SURAT KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 132 /M.PPN/03/2004

TENTANG

**TIM PENGARAH *MANAGING REGIONAL DISPARITY IN ECONOMIC DEVELOPMENT
AND POVERTY REDUCTION PROGRAMS UNDER DECENTRALIZATION***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung teknik manajemen perencanaan dan pengembangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah, Pemerintah Indonesia telah mendapat bantuan *Technical Assistance* (TA) dari *Asian Development Bank* (TA 4067-INO);
 - b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan mendampingi bantuan tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pengarah *Managing Regional Disparity in Economic Development and Poverty Reduction Programs Under Decentralization* di Tingkat Pusat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada butir b di atas;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGARAH *MANAGING REGIONAL DISPARITY IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION PROGRAMS UNDER DECENTRALIZATION*.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah *Managing Regional Disparity in Economic Development and Poverty Reduction Programs Under Decentralization*, yang untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah bertugas memberi arahan umum pelaksanaan kegiatan TA 4067-INO : "*Managing Regional Disparity in Economic Development and Poverty Reduction Programs Under Decentralization*";

KETIGA ...

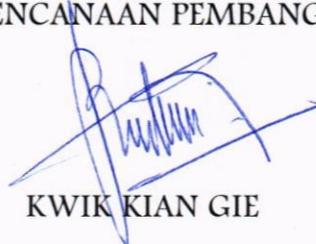
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Pendukung sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional selaku Ketua Tim Pengarah;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan kepada APBN;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Maret 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

7/34



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
5. Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek;
7. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 132 /M.PPN/03/2004

TANGGAL : 24 Maret 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH MANAGING REGIONAL DISPARITY IN ECONOMIC DEVELOPMENT
AND POVERTY REDUCTION PROGRAMS UNDER DECENTRALIZATION

Ketua : Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas;

Sekretaris : Direktur Pengembangan Otonomi Daerah, Kantor Meneg
PPN/Bappenas;

Anggota : 1. Deputi Desentralisasi Fiskal, Ekonomi dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah, Kantor Menko Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,
Kantor Menko Bidang Kesra;
3. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial,
Kantor Meneg PPN/Bappenas;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen
Dalam Negeri;

7. Direktur ...

7. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
8. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kantor Meneg Koperasi;

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

W09

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a large flourish that extends to the right.

KWIK KIAN GIE